ANALISIS DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA DALAM PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Marthin Andrian Weya
NPP. 33.0484
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: iamulagay@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si
Email: florianusaser@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The availability of adequate facilities and infrastructure is a crucial factor in supporting the effectiveness of public order enforcement and maintaining public peace. Previous studies have generally emphasized the positive relationship between facilities and organizational performance in public institutions. However, there is still limited research specifically examining the support of facilities and infrastructure in handling disturbances to public peace and order, particularly in geographically challenging regions such as Jayawijaya Regency. This research gap highlights the need for a more contextual analysis of facilities and infrastructure support in supporting the operational performance of the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja).* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the support of facilities and infrastructure in handling disturbances to public peace and order in Jayawijaya Regency.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving key informants from the Civil Service Police Unit of Jayawijaya Regency. Data analysis was conducted using the interactive model of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis was based on Moenir's theory, which consists of four dimensions: availability, quality, utilization, and maintenance.* ***Result:*** *The findings indicate that facilities and infrastructure support in handling disturbances to public peace and order in Jayawijaya Regency has not yet reached optimal conditions. In the availability dimension, operational facilities remain limited in quantity. In the quality dimension, several facilities are still in inadequate condition for operational use. In the utilization dimension, available facilities have been used to support operational activities according to organizational needs. In the maintenance dimension, facilities and infrastructure maintenance has been implemented, although improvements are still required to ensure sustainability and operational readiness.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the support of facilities and infrastructure in handling disturbances to public peace and order in Jayawijaya Regency has been implemented across the dimensions of availability, quality, utilization, and maintenance, but its overall condition has not yet fully supported optimal operational performance..*

Keywords: *Availability; Facilities and Infrastructure; Maintenance; Public Order; Utilization*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam menunjang efektivitas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai penelitian sebelumnya umumnya menekankan hubungan positif antara ketersediaan fasilitas dengan kinerja organisasi pemerintahan. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, terutama pada daerah dengan kondisi geografis yang menantang seperti Kabupaten Jayawijaya. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jayawijaya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan kunci dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya. Teknik analisis data menggunakan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian didasarkan pada teori Moenir yang meliputi empat dimensi, yaitu ketersediaan, kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharaan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jayawijaya belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi ketersediaan, sarana operasional masih terbatas dari segi jumlah. Pada dimensi kualitas, sebagian sarana masih berada pada kondisi yang belum memadai untuk mendukung operasional secara maksimal. Pada dimensi pemanfaatan, sarana yang tersedia telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan organisasi. Pada dimensi pemeliharaan, sarana dan prasarana telah mendapatkan pemeliharaan, meskipun masih memerlukan peningkatan untuk menjaga keberlanjutan dan kesiapan operasional. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jayawijaya telah berjalan pada dimensi ketersediaan, kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharaan, namun secara keseluruhan belum sepenuhnya mendukung kinerja operasional secara optimal.

Kata kunci: Dukungan Sarana dan Prasarana; Ketertiban Umum; Ketersediaan; Pemanfaatan; Pemeliharaan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi untuk menjamin stabilitas sosial, menciptakan rasa aman, serta mendukung keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan (Gunawan, 2012). Dalam perspektif administrasi publik modern, kualitas tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari keberhasilan penyusunan kebijakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan kondisi wilayah yang tertib, aman, dan kondusif bagi masyarakat. Ketenteraman dan ketertiban umum menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan secara efektif. Tanpa kondisi ketenteraman dan ketertiban yang memadai, berbagai agenda pembangunan akan menghadapi hambatan serius baik pada tingkat implementasi maupun keberlanjutannya.

Secara global, isu ketenteraman dan ketertiban umum semakin mendapat perhatian dalam tata kelola pemerintahan daerah, terutama pada wilayah yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan infrastruktur yang kompleks. Organisasi publik dituntut untuk memiliki kapasitas kelembagaan yang

kuat, termasuk dukungan sarana dan prasarana yang memadai, agar mampu menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan regulasi secara optimal. Sarana dan prasarana tidak lagi dipandang sebagai elemen pendukung semata, melainkan sebagai komponen strategis yang secara langsung menentukan efektivitas kinerja organisasi publik (Suhendi, 2019). Dalam konteks lembaga penegakan peraturan daerah, ketersediaan fasilitas operasional yang memadai menjadi faktor krusial untuk memastikan respons yang cepat, tepat, dan efisien terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban di masyarakat.

Di Indonesia, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki peran strategis dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat (Anto et al., 2026). Keberadaan Satpol PP menjadi sangat penting karena institusi ini merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan memastikan seluruh aktivitas masyarakat berjalan sesuai dengan norma hukum daerah.

Satpol PP memiliki tugas yang kompleks dan multidimensional. Selain bertanggung jawab dalam penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP juga menjalankan fungsi patroli, pengawasan lapangan, penanganan gangguan ketertiban, pengamanan kegiatan pemerintahan, hingga dukungan dalam perlindungan masyarakat pada kondisi tertentu. Kompleksitas tugas tersebut menuntut adanya dukungan organisasi yang memadai, terutama dalam aspek sarana dan prasarana operasional. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP akan mengalami penurunan, baik dari sisi kecepatan respons, jangkauan pelayanan, maupun kualitas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Manik et al., 2025).

Dukungan sarana dan prasarana menjadi komponen penting dalam menunjang kinerja Satpol PP. Menurut Moenir, sarana dan prasarana merupakan seluruh alat, fasilitas, dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses kerja agar berjalan secara efektif dan efisien. Sarana merujuk pada fasilitas yang digunakan secara langsung dalam aktivitas operasional, sedangkan prasarana merupakan fasilitas penunjang utama yang memungkinkan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks Satpol PP, sarana dan prasarana mencakup kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan lapangan, fasilitas kantor, serta infrastruktur pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan (Abdul Kadir, 2023).

Secara normatif, kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP telah diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana minimal untuk mendukung kinerja Satpol PP. Ketersediaan fasilitas operasional yang memadai diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum secara optimal.

Namun, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud pada berbagai daerah di Indonesia, terutama wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang signifikan. Salah satu daerah yang menghadapi kondisi tersebut adalah Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya merupakan wilayah strategis di Papua Pegunungan dengan karakteristik topografi pegunungan yang kompleks, aksesibilitas terbatas, serta tantangan operasional yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain. Kondisi geografis ini secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas perangkat

daerah, termasuk Satpol PP, dalam menjalankan fungsi penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Jayawijaya memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas wilayah melalui penanganan berbagai gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Bentuk gangguan tersebut mencakup penertiban pedagang kaki lima, pengawasan perizinan, pengamanan aktivitas publik, hingga penanganan berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Tingginya kebutuhan operasional tersebut menuntut dukungan sarana dan prasarana yang optimal agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data sarana dan prasarana Satpol PP Kabupaten Jayawijaya, kondisi fasilitas operasional yang tersedia masih menunjukkan keterbatasan. Satpol PP Kabupaten Jayawijaya memiliki dua unit kendaraan operasional, namun hanya satu unit yang berada dalam kondisi baik, sedangkan satu unit lainnya mengalami kerusakan berat akibat kebakaran. Selain itu, fasilitas kantor utama juga mengalami kerusakan akibat kebakaran. Dari sisi perlengkapan operasional, pakaian dinas yang tersedia sebanyak 24 stel, dengan sebagian di antaranya berada dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana operasional belum sepenuhnya berada pada kondisi ideal untuk mendukung pelaksanaan tugas secara maksimal.

Keterbatasan kualitas dan kuantitas fasilitas operasional tersebut berdampak pada kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas secara optimal. Dalam wilayah geografis seperti Jayawijaya yang memiliki tantangan medan cukup berat, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang memadai menjadi semakin penting. Kendaraan operasional yang layak, perlengkapan lapangan yang lengkap, serta fasilitas pendukung lainnya merupakan kebutuhan dasar yang menentukan efektivitas respons organisasi terhadap berbagai gangguan ketertiban di lapangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana memiliki hubungan erat dengan peningkatan efektivitas kinerja organisasi publik. Penelitian terdahulu banyak menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas operasional yang memadai berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, serta kualitas pelayanan organisasi pemerintahan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada hubungan umum antara fasilitas kerja dan kinerja organisasi, serta belum secara spesifik mengkaji dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks seperti Kabupaten Jayawijaya(Zamani & Yogia, 2015).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai analisis dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jayawijaya menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual dukungan sarana dan prasarana Satpol PP Kabupaten Jayawijaya berdasarkan dimensi ketersediaan, kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Analisis yang komprehensif terhadap keempat dimensi tersebut diperlukan untuk memahami sejauh mana dukungan sarana dan prasarana telah mendukung pelaksanaan tugas operasional organisasi.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian administrasi publik, khususnya terkait manajemen sarana dan prasarana pada organisasi perangkat daerah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar empiris bagi penguatan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP di Kabupaten Jayawijaya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "Analisis Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jayawijaya."

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Kajian mengenai dukungan sarana dan prasarana dalam organisasi publik telah banyak dilakukan, terutama dalam hubungannya dengan peningkatan efektivitas kerja, kualitas pelayanan, dan produktivitas aparatur pemerintahan. Pada level internasional, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas operasional memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi sektor publik. Penelitian oleh (Pelengkahu et al., 2026) menunjukkan bahwa dukungan fasilitas operasional berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas respons organisasi publik dalam memberikan layanan yang efisien. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Nasar et al., 2026) yang menyatakan bahwa kualitas sarana dan prasarana memengaruhi stabilitas operasional organisasi pemerintah, khususnya pada institusi yang berorientasi pada pelayanan lapangan. Sementara itu, (Gustamam et al., 2026) menegaskan bahwa optimalisasi fasilitas operasional memiliki korelasi positif terhadap peningkatan efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Pada konteks nasional, kajian mengenai sarana dan prasarana juga menunjukkan kecenderungan hasil yang serupa. Penelitian (Gunawan, 2012) menemukan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai Satpol PP. Penelitian (Supriatna, 2020) juga menunjukkan bahwa fasilitas operasional seperti kendaraan, alat komunikasi, dan perlengkapan lapangan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas ketertiban umum. Selain itu, (Manik et al., 2025) menyimpulkan bahwa dukungan fasilitas operasional memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kinerja Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah. Hasil-hasil tersebut menunjukkan adanya konsensus bahwa sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung efektivitas organisasi pemerintahan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian terdahulu. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada hubungan umum antara sarana dan prasarana dengan kinerja organisasi tanpa melakukan analisis yang lebih mendalam berdasarkan dimensi spesifik dukungan sarana dan prasarana. Kedua, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan hubungan variabel, sehingga belum banyak memberikan gambaran kontekstual mengenai kondisi aktual fasilitas operasional di lapangan. Ketiga, penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada wilayah dengan kondisi geografis relatif normal, sehingga belum menggambarkan realitas operasional organisasi pada daerah dengan tantangan geografis berat.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang belum banyak dikaji, khususnya terkait analisis dukungan sarana dan prasarana pada organisasi perangkat daerah yang beroperasi di wilayah dengan karakteristik geografis kompleks. Kabupaten Jayawijaya memiliki kondisi yang unik karena berada di wilayah pegunungan dengan aksesibilitas yang terbatas dan tantangan operasional yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana operasional menjadi lebih krusial dibandingkan daerah lain. Dalam konteks tersebut, analisis terhadap dukungan sarana dan prasarana tidak cukup hanya dilihat dari hubungan statistik terhadap kinerja, tetapi perlu dipahami secara lebih mendalam berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya penelitian yang secara spesifik menganalisis dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pendekatan kualitatif berdasarkan dimensi ketersediaan, kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharaan pada lokus Satpol PP Kabupaten Jayawijaya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih kontekstual dan mendalam mengenai dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas operasional Satpol PP di Kabupaten Jayawijaya.

1.3. Urgensi

Secara teoritis, penelitian mengenai dukungan sarana dan prasarana dalam organisasi publik memiliki posisi yang penting dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya pada aspek manajemen sumber daya organisasi. Sarana dan prasarana merupakan elemen fundamental yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas suatu organisasi pemerintahan. Dalam perspektif teori manajemen pelayanan publik, keberadaan fasilitas kerja yang memadai berperan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan organisasi. Moenir (2010) menegaskan bahwa sarana dan prasarana bukan sekadar alat pendukung, melainkan bagian integral dari sistem kerja organisasi yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Dalam konteks Satpol PP, kajian mengenai dukungan sarana dan prasarana menjadi relevan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk memperkuat kajian teoritis mengenai hubungan antara dukungan fasilitas operasional dengan efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Secara praktis, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi aktual dukungan sarana dan prasarana Satpol PP Kabupaten Jayawijaya dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Kabupaten Jayawijaya memiliki karakteristik geografis yang kompleks dengan kondisi wilayah pegunungan dan aksesibilitas yang terbatas. Kondisi tersebut menuntut tersedianya fasilitas operasional yang memadai agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara optimal. Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas operasional, terutama dalam menunjang mobilitas, respons lapangan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kondisi dukungan sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP di Kabupaten Jayawijaya.

Secara kebijakan, penelitian ini memiliki urgensi sebagai landasan akademik dan empiris dalam mendukung penguatan tata kelola sarana dan prasarana Satpol PP di daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif mengenai kondisi aktual fasilitas operasional Satpol PP berdasarkan dimensi ketersediaan, kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Informasi tersebut menjadi penting sebagai dasar evaluasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah, khususnya Satpol PP Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam mendukung pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan operasional Satpol PP, terutama pada daerah dengan karakteristik geografis yang menantang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai strategis baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

1.4. Penelitian Terdahulu

Telah terhadap literatur dan hasil penelitian terdahulu sangat penting dilakukan guna memetakan posisi akademik penelitian ini, memahami perkembangan kajian, serta menghindari adanya duplikasi pembahasan. Kajian mengenai keterkaitan antara manajemen sarana prasarana dengan kapasitas operasional organisasi sektor publik telah banyak dieksplorasi oleh para peneliti terdahulu, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Pada level internasional, beberapa studi menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas terhadap respons organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Suhendi, 2019) menunjukkan bahwa dukungan fasilitas operasional memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan kapasitas respons

instansi lokal dalam memberikan pelayanan yang efisien. Temuan tersebut diperkuat oleh melalui kajiannya mengenai stabilitas operasional pada institusi pemerintah yang berorientasi lapangan. Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sarana dan prasarana secara langsung menentukan tingkat stabilitas serta jangkauan pelayanan operasional di lapangan. Lebih lanjut, (Manik et al., 2025) dalam penelitiannya mengenai efisiensi sektor publik menegaskan bahwa optimalisasi fasilitas kerja memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas organisasi dalam mengeksekusi tugas-tugas pelayanan publik.

Sementara itu, dalam konteks nasional, fokus penelitian banyak diarahkan pada pengaruh ketersediaan sarana terhadap kinerja aparatur penegak regulasi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Gustamam et al., 2026) menyimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kerja berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas dan peningkatan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Sejalan dengan hal tersebut, (Zamani & Yogia, 2015) melakukan analisis terhadap sarana operasional dalam penegakan peraturan daerah, di mana hasil penelitiannya membuktikan bahwa pemenuhan fasilitas utama seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan perlengkapan lapangan menjadi faktor penentu efektivitas jalannya fungsi ketertiban umum. Selain itu, (Supriatna, 2020)dalam kajiannya mengenai fasilitas lapangan juga menegaskan bahwa dukungan sarana yang memadai memiliki hubungan positif yang kuat dengan keberhasilan Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah di masyarakat.

Secara umum, berbagai penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menempatkan sarana dan prasarana sebagai elemen krusial yang menentukan efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya pada instansi Satpol PP. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang menjadi pembeda sekaligus letak orisinalitas penelitian ini. Sebagian besar studi terdahulu dilakukan pada wilayah urban atau daerah dengan karakteristik geografis normal, serta dalam kondisi organisasi yang stabil.

Penelitian ini, di sisi lain, mengambil lokus di Kabupaten Jayawijaya yang memiliki tantangan topografi pegunungan yang ekstrem serta keterbatasan aksesibilitas wilayah. Perbedaan paling krusial terletak pada kondisi empiris organisasi yang diteliti, di mana Satpol PP Kabupaten Jayawijaya sedang menghadapi krisis sarana akibat musibah kebakaran yang menghancurkan gedung kantor utama dan merusak sebagian besar armada operasional mereka. Dengan demikian, fokus narasi penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh sarana dalam kondisi ideal, melainkan menganalisis secara mendalam bagaimana dimensi ketersediaan, kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharaan dikelola di tengah keterbatasan sarana pascabencana pada wilayah dengan tantangan geografis khusus.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan telaah mendalam terhadap berbagai penelitian terdahulu yang berfokus pada manajemen sarana dan prasarana organisasi sektor publik, sebagian besar literatur menunjukkan kecenderungan hasil yang seragam, yaitu adanya hubungan linier positif antara kecukupan fasilitas fisik dengan efektivitas kinerja aparatur. Penelitian-penelitian terdahulu, baik dalam skala nasional maupun internasional, umumnya mengambil lokus pada wilayah perkotaan atau daerah dengan aksesibilitas yang normal dan stabil, di mana evaluasi dilakukan dalam kondisi manajerial organisasi yang berjalan secara ideal. Keterbatasan fokus dalam literatur-literatur tersebut menyisakan ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi, khususnya mengenai dinamika pengelolaan sarana prasarana penegakan ketertiban umum pada wilayah terpencil yang sedang mengalami krisis internal organisasi akibat bencana.

Pernyataan kebaruan ilmiah (*state of the art*) dalam penelitian ini terletak pada pembedahan secara komprehensif mengenai bagaimana empat dimensi manajemen sarana dan prasarana menurut teori Moenir yaitu ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), pemanfaatan (*utilization*), dan

pemeliharaan (*maintenance*) diuji pada kondisi ekstrem dan tidak ideal. Kebaruan pertama bersumber dari karakteristik geografis Kabupaten Jayawijaya yang memiliki topografi pegunungan ekstrem dan keterbatasan akses logistik, sehingga menciptakan standar kebutuhan serta pola mobilitas armada operasional yang sangat berbeda dengan wilayah urban.

Kebaruan kedua dan yang paling krusial adalah adanya variabel hambatan berupa rusaknya fasilitas vital akibat musibah kebakaran yang menghancurkan gedung kantor utama serta melumpuhkan sebagian besar aset armada operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jayawijaya. Kondisi ini memicu sebuah anomali operasional di mana organisasi penegak regulasi daerah dituntut untuk tetap menjaga stabilitas ketenteraman masyarakat di tengah lumpuhnya dimensi ketersediaan dan penurunan drastis dimensi kualitas fisik alat kerja.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menawarkan orisinalitas perspektif dengan tidak sekadar melihat pengaruh fasilitas dalam kondisi mapan, melainkan menganalisis strategi pemanfaatan (*utilization*) sisa aset yang serba terbatas secara bergiliran untuk merespons gangguan ketertiban secara efektif. Selain itu, penelitian ini berkontribusi memberikan kebaruan teoretis dalam kajian manajemen administrasi publik dan logistik sektor publik dengan mengintegrasikan manajemen risiko bencana, mitigasi pengelolaan aset pascabencana, dan klasterisasi kluster geografis khusus ke dalam perumusan kebijakan standardisasi pemenuhan sarana prasarana minimal instansi pemerintah.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jayawijaya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan metode kualitatif deskriptif ini didasarkan pada karakteristik masalah yang diteliti, yang membutuhkan pemahaman mendalam, menyeluruh, dan kontekstual mengenai dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Metode ini dipilih karena peneliti tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan statistik antarvariabel, melainkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi riil di lapangan terkait dimensi ketersediaan, kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas operasional. Mengingat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jayawijaya sedang menghadapi situasi kompleks berupa keterbatasan aset pascamusibah kebakaran di tengah tantangan geografis yang ekstrem, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, hambatan manajerial, dan strategi adaptasi organisasi secara lebih fleksibel langsung dari sudut pandang para aktor pelaksana di lapangan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang dinilai memiliki pemahaman kaya informasi terkait masalah penelitian. Informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya. Alasan penunjukan beliau sebagai informan kunci adalah karena kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi sekaligus pengambil keputusan utama yang bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan pengelolaan anggaran, perencanaan pemenuhan sarana prasarana, serta arah kebijakan operasional penegakan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Untuk melengkapi dan melakukan konfirmasi silang terhadap data yang diperoleh dari informan kunci, peneliti juga menetapkan beberapa informan

pendukung, yaitu Pejabat Struktural atau Fungsional Bagian Logistik/Aset Satpol PP serta Anggota Operasional Lapangan atau Komandan Regu Patroli. Pejabat logistik dipilih karena mereka menguasai data teknis, dokumen inventarisasi barang, laporan kondisi fisik sarana, serta mekanisme pemeliharaan aset pascabencana kebakaran. Sementara itu, anggota operasional lapangan dipilih karena mereka merupakan personel yang bersentuhan langsung secara teknis dengan penggunaan kendaraan operasional dan perlengkapan lapangan, sehingga mengetahui secara riil hambatan kualitas dan kuantitas fasilitas saat merespons gangguan ketertiban di masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan lokus utama pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya. Pemilihan tempat ini didasarkan pada urgensi kondisi empiris organisasi yang mengalami kelangkaan sarana kerja pascabencana di wilayah dengan topografi pegunungan tengah Papua yang khas. Penelitian lapangan ini dilaksanakan selama kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan. Durasi waktu tersebut dinilai cukup bagi peneliti untuk melakukan observasi yang mendalam, wawancara berulang guna mencapai kejenuhan data, serta mengumpulkan dokumen-dokumen inventarisasi yang diperlukan pasca-peristiwa kebakaran kantor.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik interaktif guna memperoleh data yang komprehensif, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel guna menggali informasi mendalam mengenai aspek ketersediaan, kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas. Observasi lapangan dilaksanakan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik bangunan kantor darurat, sisa kendaraan operasional yang masih berfungsi, kondisi pakaian dinas personel, serta bagaimana sisa fasilitas tersebut digunakan saat pelaksanaan patroli wilayah. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi, seperti laporan inventaris barang, dokumen rencana kerja, draf regulasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, serta arsip data pendukung yang memengaruhi ketersediaan aset organisasi.

Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan data kualitatif yang diperoleh agar terhindar dari bias subjektif, peneliti menerapkan teknik pengujian data melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda, misalnya membandingkan data kebijakan dari Kepala Satpol PP dengan data teknis dari bagian logistik dan realitas di lapangan. Di sisi lain, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, yaitu mencocokkan hasil wawancara lisan informan mengenai keterbatasan kendaraan dengan bukti fisik hasil observasi langsung di lapangan, serta diperkuat oleh data tertulis dalam dokumen inventarisasi aset.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang berjalan secara simultan dan melingkar melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (data *reduction*), penyajian data (data *display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum, memilih data esensial, memfokuskan pada hal-hal penting, serta membuang data yang tidak relevan dari catatan lapangan hasil

wawancara dan observasi. Data tersebut dikelompokkan berdasarkan empat dimensi teori Moenir yang meliputi ketersediaan, kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Selanjutnya, dalam tahap penyajian data, data yang telah direduksi kemudian dirakit dan disajikan ke dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur, matriks, atau bagan guna mempermudah peneliti melihat pola hubungan dan memahami dinamika kelangkaan sarana di lapangan. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti mencari makna dari setiap data yang tersaji, mencatat keteraturan atau anomali operasional, dan merumuskan kesimpulan akhir yang kokoh serta kredibel mengenai dukungan sarana prasarana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jayawijaya menggunakan pendapat dari Moenir yang menyatakan bahwa manajemen fasilitas operasional pelayanan dapat diukur melalui empat dimensi utama, yaitu dimensi ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), pemanfaatan (*utilization*), dan pemeliharaan (*maintenance*). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi ketersediaan sarana operasional melalui pemenuhan kuantitas fisik aset yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jayawijaya berkaitan dengan kecukupan armada patroli dan perlengkapan perorangan personel lapangan.

Tabel 1.
Jawaban Responden terhadap Kecukupan Jumlah Kendaraan Patroli Lapangan

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
Memadai	5	10
Cukup	14	28
Kurang Memadai	31	62
Jumlah	**50**	**100**

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Tabel 2.
Jawaban Responden terhadap Kecukupan Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Personel

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
Memadai	6	12
Cukup	11	22
Kurang Memadai	33	66
Jumlah	**50**	**100**

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Pada Tabel 1 sejumlah 50 responden memberikan respons tertinggi pada pilihan kurang memadai yakni sebanyak 31 responden atau sekitar 62 persen, selisih 17 responden dengan pilihan cukup yang mendapatkan respons 14 responden atau 28 persen, sedangkan paling rendah berada pada pilihan memadai yaitu hanya 5 responden atau sekitar 10 persen. Lebih lanjut terkait realitas kelangkaan kuantitas ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya menegaskan bahwa ketersediaan sarana operasional saat ini memang sangat minim sekali, di mana dengan wilayah

Kabupaten Jayawijaya yang luas dan memiliki tantangan geografis tersendiri, instansi hanya didukung oleh dua unit mobil operasional untuk menggerakkan seluruh anggota. Dalam hasil wawancara penulis dengan Anggota Operasional Lapangan yang ikut dalam regu patroli juga menyatakan bahwa petugas di lapangan sering kewalahan karena jumlah kendaraan patroli sangat sedikit, sehingga jika ada laporan gangguan ketertiban di dua tempat berbeda pada waktu yang sama, terpaksa menunda salah satunya karena mobil harus digunakan bergantian.

Berdasarkan Tabel 2 penulis memperoleh hasil respons tertinggi pada kecukupan seragam juga pada pilihan kurang memadai dengan total 33 respons atau 66 persen, dan respons terendah berada pada pilihan memadai yaitu 6 responden atau 12 persen. Data tersebut dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Pejabat Struktural Bagian Logistik Satpol PP yang mengatakan bahwa perlengkapan seragam lapangan sangat terbatas, di mana jatah pakaian dinas lapangan (PDL) baru yang layak pakai hanya berjumlah 24 stel untuk semua anggota operasional, sehingga banyak anggota yang terpaksa memakai seragam lama yang sudah luntur karena jatah seragam baru tidak mencukupi untuk semua personel. Sejalan dengan hasil wawancara tersebut, salah satu responden dari anggota operasional lapangan mengonfirmasi bahwa keterbatasan seragam dinas baru ini membuat pembagian perlengkapan perorangan menjadi tidak merata, sehingga performa visual pasukan saat apel maupun saat penertiban di lapangan menjadi kurang seragam.

Penulis menyimpulkan pengukuran terhadap ketersediaan sarana dan prasarana operasional pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya, baik dari segi kecukupan armada kendaraan patroli maupun perlengkapan pakaian dinas perorangan petugas lapangan, secara umum masih berada pada tingkat ketersediaan yang sangat rendah dan kurang memadai dari standar kebutuhan ideal.

3.2. Kualitas Sarana dan Prasarana

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi kualitas sarana dan prasarana melalui kelayakan fisik bangunan komando, kondisi teknis kendaraan, serta ketahanan operasional alat kerja yang dimiliki oleh instansi.

Tabel 3.
Jawaban Responden terhadap Kelayakan Fisik Fasilitas Kantor dan Bangunan Operasional

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
Layak	4	8
Cukup Layak	15	30
Tidak Layak	31	62
Jumlah	**50**	**100**

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Terkait indikator kelayakan fisik bangunan kantor dan fasilitas operasional pascabencana pada Tabel 3, dari 50 sampel responden menunjukkan respons tertinggi berada pada pilihan tidak layak yakni sebanyak 31 responden atau sekitar 62 persen. Dalam hasil wawancara kami dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, beliau menjelaskan bahwa masalah kualitas ini menjadi pukulan berat bagi instansi setelah musibah kebakaran hebat yang melanda kompleks kantor utama, yang mengakibatkan gedung kantor hancur total sehingga aktivitas administratif terpaksa dialihkan ke bangunan darurat sementara yang kondisinya sangat terbatas. Wawancara di atas menunjukkan bahwa penurunan drastis kualitas prasarana ini disebabkan oleh faktor kedaruratan yang melumpuhkan kenyamanan dan standardisasi ruang kerja internal organisasi.

Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa selain hancurnya fasilitas gedung, penurunan kualitas fisik yang masif juga melanda armada bergerak, di mana dari 2 unit kendaraan yang ada, hanya 1 unit yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi prima, sedangkan 1

unit lainnya mengalami kerusakan berat dan menjadi rongsokan akibat ikut terbakar. Peneliti mengamati interior bangunan kantor darurat yang digunakan saat ini memiliki keterbatasan ruang, sirkulasi udara, serta keterbatasan fasilitas penunjang kerja administratif yang jauh dari standar kelayakan ideal sebuah kantor instansi pemerintah. Pengamatan langsung pada saat apel pagi juga memperlihatkan sebagian besar pakaian dinas lapangan yang digunakan anggota sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan fisik dan aus akibat frekuensi pemakaian lapangan yang tinggi tanpa adanya sistem pengadaan baru yang berkualitas.

3.3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Penulis mengevaluasi tingkat utilitas sisa fasilitas operasional yang ada guna melihat sejauh mana aset yang serba terbatas tersebut mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok penegakan ketertiban harian.

Tabel 4.
Jawaban Responden terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Sisa Kendaraan Patroli untuk Tugas Lapangan

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
Sangat Optimal	28	56
Cukup Optimal	17	34
Tidak Optimal	5	10
Jumlah	**50**	**100**

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Tabel 5.
Jawaban Responden terhadap Efektivitas Pemanfaatan Pakaian Dinas Lapangan secara Bergantian

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
Efektif	25	50
Cukup Efektif	21	42
Tidak Efektif	4	8
Jumlah	**50**	**100**

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2026

Dalam indikator pemanfaatan hasil pada Tabel 4, diperoleh hasil respons yang paling tinggi adalah pilihan sangat optimal yakni sebanyak 28 responden atau sekitar 56 persen, sedangkan paling rendah berada pada pilihan tidak optimal yakni 5 responden atau sekitar 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah kelangkaan kuantitas, tingkat pendayagunaan alat operasional yang tersisa dipaksa berjalan secara maksimal tanpa henti.

Pada aspek pemanfaatan pakaian dinas lapangan secara bergantian yang tertuang pada Tabel 5, respons tertinggi berada pada pilihan efektif yaitu sebanyak 25 responden atau sekitar 50 persen, sedangkan respons terendah berada pada pilihan tidak efektif yaitu 4 responden atau sekitar 8 persen. Hasil utama dalam dimensi pemanfaatan ini menunjukkan komitmen manajerial organisasi yang menuntut efisiensi penggunaan sisa fasilitas yang ada demi menjamin fungsi pelayanan publik tidak mandek. Sejalan dengan hasil wawancara terhadap Kepala Satpol PP Kabupaten Jayawijaya bahwa instansi berkomitmen untuk tidak menjadikan kelangkaan fasilitas pascabencana sebagai alasan untuk berhenti bekerja, sehingga satu-satunya mobil patroli yang berfungsi baik dimanfaatkan secara bergiliran dan nonstop untuk patroli wilayah, mengawal penertiban pedagang kaki lima (PKL),

melakukan pengawasan izin-izin usaha di lapangan, hingga pengamanan acara publik dan pengawalan bupati.

Dalam hal taktis operasional lapangan, anggota regu patroli menyampaikan bahwa pemandangan mobil patroli yang satu itu digunakan berganti-ganti tim dari pagi, siang, sampai patroli malam merupakan hal rutin, termasuk penggunaan seragam dinas lapangan 24 stel yang dipakai bergantian oleh anggota regu yang mendapat giliran piket operasional. Studi dokumentasi terhadap Rencana Kerja (Renja) instansi memperlihatkan bahwa pemanfaatan sisa aset tersebut diprioritaskan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketenteraman di titik-titik rawan wilayah Jayawijaya. Melalui sinergi pemanfaatan yang tinggi ini, ketertiban umum di wilayah Kabupaten Jayawijaya tetap dapat dikendalikan dengan mengandalkan dedikasi personel di lapangan serta pemanfaatan sarana secara tepat guna.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana memberikan dampak yang besar terhadap kapasitas respons organisasi dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Penulis menemukan temuan penting yakni meskipun Satpol PP Kabupaten Jayawijaya berada dalam krisis logistik pascabencana, organisasi tetap mampu menjalankan fungsinya dengan cukup baik dikarenakan adanya optimalisasi pemanfaatan sisa aset secara luar biasa melalui komitmen manajerial pimpinan dan militansi personel lapangan. Berbeda dengan temuan penelitian terdahulu yang menganalisis kendala sarana prasarana dalam kondisi operasional normal di kota besar, penelitian di Kabupaten Jayawijaya ini menguji dimensi manajemen sarana prasarana di tengah kelumpuhan total aspek ketersediaan gedung kantor utama dan kerusakan mayor armada bergerak akibat musibah kebakaran. Temuan ini menolak asumsi linier beberapa penelitian konvensional yang menyatakan penurunan kuantitas fasilitas otomatis menghentikan operasional pelayanan, karena dalam kasus ini, mekanisme kerja adaptif organisasi publik terbukti mampu mengompensasi keterbatasan fisik untuk sementara waktu.

Layaknya pengelolaan logistik darurat, keterbatasan ini lambat laun memicu kelemahan sistemik, di mana pemanfaatan sarana bergerak digital dan armada taktis yang overload diakui belum ideal karena tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas alat, sejalan dengan temuan mengenai hambatan pemenuhan standar fasilitas di wilayah terremote. Selanjutnya, karakteristik unik dari temuan ini adalah bahwa dalam merumuskan standardisasi kebutuhan fasilitas, pemerintah tidak bisa menyamakan wilayah pegunungan yang ekstrem dengan wilayah urban karena pola depresiasi dan kebutuhan jenis kendaraan sangat berbeda. Hal ini memperkuat temuan teoretis Moenir bahwa kegagalan pemerintah dalam menjamin dimensi ketersediaan dan memulihkan dimensi kualitas pascabencana secara otomatis akan memberikan beban berlebih (over-utilization) pada dimensi pemanfaatan aset yang tersisa. Artinya, keberhasilan menjaga stabilitas keamanan di Jayawijaya saat ini murni bertumpu pada asas kesukarelaan dan dedikasi personel, yang selaras dengan prinsip kedaruratan organisasi dalam mempertahankan pelayanan publik primer.

Adanya program pemulihan aset pascabencana secara jangka panjang diharapkan mampu menstabilkan kembali sarana operasional instansi secara masif, sehingga mampu menunjang penegakan regulasi daerah secara optimal. Terkait analisis dukungan sarana prasarana dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum, terdapat beberapa temuan penting yang saling berkelindan di lapangan. Temuan pertama mengenai urgensi pemulihan kualitas fisik menunjukkan bahwa pemulihan gedung kantor utama dan armada patroli pascabencana merupakan prioritas mutlak untuk mengembalikan fungsi komando dan efisiensi koordinasi organisasi. Di sisi lain, muncul anomali dalam hal optimalisasi pemanfaatan, di mana keterbatasan kuantitas memaksa terjadinya utilitas tinggi yang melebihi kapasitas normal (over-utilization) pada sisa aset bergerak yang ada.

Efektivitas penanganan gangguan keamanan di lapangan ini juga memunculkan ketergantungan yang kuat pada militansi aparatur, di mana keberhasilan operasional sangat bertumpu pada dedikasi personel yang secara sukarela mengompensasi kelangkaan fasilitas kerja. Selain itu, terdapat spesifikasi geografis khusus yang memperlihatkan bahwa karakteristik topografi pegunungan Jayawijaya menuntut kualitas spesifikasi kendaraan operasional yang andal dan berdaya tahan tinggi. Namun, seluruh dinamika ini dibayangi oleh kerentanan berkelanjutan, di mana pola pemeliharaan yang buruk di tengah beban pemanfaatan yang terlampau tinggi berisiko mengancam kelangsungan operasional jangka panjang institusi secara keseluruhan. Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana yang proporsional pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun kapasitas organisasi sektor publik yang tangguh dan responsif.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat utama dalam pengelolaan sarana prasarana Satpol PP Kabupaten Jayawijaya ini adalah pola pemeliharaan aset yang masih bersifat kuratif kondisional, di mana tindakan perbaikan baru dilakukan setelah kendaraan menghadapi kerusakan mesin yang berat karena ketiadaan alokasi anggaran perawatan rutin pascabencana. Faktor pendukung yang menjaga berjalannya fungsi organisasi adalah tingginya fleksibilitas koordinasi antarregu dalam penjadwalan penggunaan sisa fasilitas patroli secara bergiliran. Keterbatasan sarana prasarana ini juga dihambat oleh lambatnya proses birokrasi pengadaan logistik baru akibat klasterisasi geografis wilayah terpencil yang menyulitkan distribusi material pengganti.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jayawijaya, dapat disimpulkan bahwa manajemen fasilitas operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya berada dalam kondisi ketidakseimbangan manajerial yang kritis akibat akumulasi kendala geografis wilayah terpencil dan dampak musibah bencana kebakaran internal organisasi. Evaluasi mendalam melalui teori Moenir menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang tajam pada dimensi ketersediaan dan dimensi kualitas, di mana kapasitas logistik gedung kantor serta kuantitas armada patroli maupun perlengkapan perorangan berada di bawah standar minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019. Meskipun organisasi menunjukkan resiliensi taktis yang tinggi pada dimensi pemanfaatan melalui skema optimalisasi sisa aset secara bergiliran demi menjaga kesinambungan pelayanan publik, daya dukung tersebut terus dibayangi oleh risiko depresiasi tinggi akibat dimensi pemeliharaan yang masih bersifat kuratif kondisional dan belum terstruktur akibat keterbatasan anggaran rutin pascabencana. Kegagalan dalam memulihkan dimensi kualitas dan menjamin stabilitas ketersediaan ini secara simultan menjadi hambatan struktural yang membatasi akselerasi, daya jangkau operasional, serta efisiensi kapasitas respons penegak regulasi daerah dalam menjaga stabilitas ketenteraman masyarakat di wilayah pegunungan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan kontekstual yang perlu diakui. Pertama, fokus kajian ini terbatas pada pendekatan kualitatif deskriptif berskala mikro, sehingga tidak mengukur secara kuantitatif tingkat signifikansi hubungan atau dampak kausalitas antarvariabel yang diteliti. Kedua, penelitian ini hanya memiliki locus tunggal di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan kondisi spesifik pascabencana kebakaran internal kantor, sehingga generalisasi temuan untuk wilayah lain dengan karakteristik sosiologis dan geografis yang berbeda menjadi terbatas. Ketiga, analisis manajemen sarana prasarana dalam penelitian ini

belum mengintegrasikan instrumen manajemen risiko bencana formal dan mitigasi kontinjensi aset publik secara komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti selanjutnya disarankan untuk menerapkan metode penelitian campuran (mixed-methods) dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan metode kuantitatif guna menguji secara statistik tingkat pengaruh laju depresiasi sarana pascabencana terhadap penurunan indeks kinerja pelayanan publik. Selain itu, studi berikutnya perlu memperluas cakupan wilayah melalui penelitian komparatif yang melibatkan beberapa instansi Satpol PP di kabupaten lain dalam klaster wilayah terpencil atau kepulauan guna merumuskan model standardisasi logistik publik yang lebih universal. Terakhir, arah kajian masa depan dapat diorientasikan pada integrasi teori manajemen fasilitas dengan teori perencanaan keberlanjutan bisnis (business continuity plan) sektor publik serta manajemen risiko bencana guna menghasilkan cetak biru tata kelola pemulihan aset kedaruratan yang tangguh (resilient asset management).

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawjaya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir, I. (2023). Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SATPOL PP Maluku Utara: Menegakkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Melindungi Masyarakat. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, *2*(2), 72–83. https://doi.org/10.62394/scientia.v2i2.68

Anto, A., Hutasoit, I., Maileni, D. A., & Riyanto, A. (2026). Evaluasi Kinerja Bidang Ketertiban Umum Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Kasus di Batam, Kepualauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *6*(3), 2335–2347. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7941

Gunawan, G. (2012). Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh. *Jurnal Bina Praja*, *04*(02), 117–126. https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.117-126

Gustamam, G., Tri, R., Bhakti, A., Maileni, D. A., & Kepulauan, U. R. (2026). *Assessing the performance of police civil servants (satpol pp) officers in enforcement of public order: empirical study of discipline and ethics*. *5*(5), 2722–2728. 10.5281/zenodo.20085297

Manik, M., Hutauruk, A., & Sihotang, M. (2025). Enforcement of Business Order by the Municipal Police in Pulogadung District under Jakarta Regional Regulation No. 8 of 2007 on Public Order. *Equality : Journal of Law and Justice*, *2*(2), 272–289. https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v2i2.498

Nasar, M., Bhakti, R. T. A., Maileni, D. A., & Sakti, I. (2026). Discretion of Public Order Agency (Satpol PP) in Enforcing Regional Regulations: A Normative Review of Conditions, Limits and Accountability. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *8*(3), 1692–1705. https://doi.org/10.38035/rrj.v8i3.2054

Pelengkahu, M., Palengkahu, R., & Kasim, F. M. (2026). The Indonesian Satpol-PP Model: Lessons for Local Governance and Public Order Enforcement in Decentralized States. *Journal of Law and Humanity Studies*, *3*(1), 1–13. https://doi.org/10.59613/hh1pte54

Suhendi, D. (2019). Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketenteraman dan

ketertiban umum di kabupaten indramayu provinsi jawa barat). *Jurnal Tatapamong*, 35–47. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145

Supriatna, D. (2020). Sinergisitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Konstituen*, *2*(1), 37–45. https://doi.org/10.33701/jk.v2i1.2341

Zamani, M. N., & Yogia, M. A. (2015). Pelaksanaan Kewenangan Satpol PP Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketertiban Umum Studi DI Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Publika*, *1*(2), 1–22. https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/1552/973